

GAMBARAN DETERMINASI KUALITAS INFORMASI KEUANGAN PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA PALEMBANG

Rita Martini^{1*}, Fildzah Rahmah Satirah², Nurhasanah³, Kartini binti Che Ibrahim⁴, Kartika Rachman Sari⁵, Endah Widyastuti⁶, Farida Husin⁷, Amelia Agustia Riskya Saputri⁸

^{1,2,3,5,6,7,8} Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Sriwijaya

⁴ Jabatan Perdagangan, Politeknik Mukah, Sarawak, Malaysia

ritamartini@polsri.ac.id^{1*}, fildzah983@gmail.com², fatihfauziakbar@yahoo.co.id³, kartini@pmu.edu.my⁴, kartikasyahrul@gmail.com⁵, endahwiwid73@gmail.com⁶, amelia.plg15@gmail.com⁸

Abstract

Palembang city government is expected to improve and maintain consistency in the application of SAP and SPI. It is necessary to always improve the quality of human resources by providing training or work practices that add knowledge, skills, and behavior to old and new employees. Service activities show partners are motivated and gain an understanding of the importance of maintaining the quality of government financial information, to optimizing the implementation of SAP, implementing SPI, and the importance of HR competencies. To obtain more optimal results, the study and dissemination of the results of the study should be carried out continuously and routinely. Similar activities should also involve more parties related to financial accounting management.

Keywords: financial, information, government accounting.

1. PENDAHULUAN

Salah satu bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan pemerintah daerah yaitu menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). LKPD disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh pemerintah daerah selama satu periode pelaporan. Karakteristik kualitatif suatu laporan keuangan yang harus dipenuhi agar mempunyai informasi yang bermanfaat menurut Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.

Faktor selanjutnya yang dapat meningkatkan kualitas informasi laporan keuangan pemerintah adalah Sistem Pengendalian Intern (SPI). Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah disebutkan bahwa SPI diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pada Peraturan

Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Pasal 2, untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel, menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan. Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah juga tidak terlepas dari pengaruh sumber daya manusia (SDM). Kompetensi SDM yang memadai sebagai pengelola keuangan tentunya akan meningkatkan kualitas informasi laporan keuangan.

Salah satu yang menjadi indikator kualitas akuntabilitas keuangan yaitu dilihat dari opini auditor eksternal (BPK) secara bertingkat terdiri dari: Tidak Wajar (TW), Tidak Memberikan Pendapat (TMP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), dan yang terbaik adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Pemberian opini BPK RI, khususnya opini WTP diungkapkan oleh Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani bermanfaat dalam menggambarkan kesesuaian pengelolaan keuangan dengan tata kelola terhadap ketentuan

perundangundangan. Selain itu, kepercayaan publik termasuk investor kepada pemerintah daerah akan semakin meningkat sehingga dapat mendorong percepatan pembangunan terutama pada sektor prioritas daerah dan menjadi pemicu bagi pemerintah untuk terus meningkatkan pengelolaan anggaran serta manfaatnya bagi kesejahteraan masyarakat (Martini, dkk., 2020).

Berdasarkan opini BPK atas LKPD Wilayah Sumatera Selatan di antara 18 kabupaten/kota, pemerintah kota Palembang merupakan satu-satunya pemerintah daerah yang mendapat Opini WTP tujuh kali berturut-turut terhitung sejak tahun pelaporan 2010 hingga 2016 (Martini, dkk., 2020). Perolehan opini tertinggi atas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Palembang secara konsisten selama tujuh kali berturut-turut menjadi suatu fenomena yang sangat menarik untuk mendapatkan faktor apakah yang mempengaruhi kualitas LKPD Kota Palembang sehingga mendapat opini WTP dari BPK.

Tujuan utama dari program pengabdian kepada masyarakat ini ialah untuk memberikan pemahaman dan pendampingan bagi Sekretariat Daerah Kota Palembang, mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas informasi laporan keuangan khususnya dari aspek SPI, kompetensi SDM dan penerapan SAP.

Tujuan khusus kegiatan pengabdian ini agar Mitra:

1. Memahami konsepsi dasar faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas informasi laporan keuangan,
2. Memahami dan menguasai teknis kualitas informasi laporan keuangan.
3. Memahami dan menguasai teknis SPI, kompetensi SDM dan penerapan SAP.
4. Memahami dan menguasai kualitas informasi laporan keuangan, dari aspek SPI, kompetensi SDM dan penerapan SAP.

2. IDENTIFIKASI MASALAH

LKPD pemerintah kota Palembang disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh

pemerintah daerah selama satu periode pelaporan. Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah juga tidak terlepas dari pengaruh SPI, SDM, dan penerapan SAP. Berdasarkan uraian analisis situasi, maka rumusan permasalahan yaitu: perlunya mitra memahami sejauhmana SPI, kompetensi SDM dan penerapan SAP mempengaruhi kualitas informasi laporan keuangan pada Sekretariat Daerah Kota Palembang.

Identifikasi permasalahan mitra, secara khusus dijabarkan berikut ini;

1. Mitra kurang memahami dan menguasai kualitas informasi laporan keuangan.
2. Mitra kurang memahami dan menguasai aspek SPI, kompetensi SDM dan penerapan SAP.
3. Mitra kurang memahami dan menguasai pengaruh aspek SPI, kompetensi SDM dan penerapan SAP terhadap kualitas informasi laporan keuangan.

3. METODE PELAKSANAAN

Untuk dapat mengatasi identifikasi masalah, mitra diberi pengetahuan melalui ceramah berkaitan dengan teknis mengenai akuntansi keuangan. Akuntansi keuangan merupakan cabang akuntansi yang bertujuan umum sebagai panduan dalam pengelolaan transaksi keuangan (pembukuan) sampai pelaporan informasi akuntansi berupa Laporan Keuangan. Selain itu mitra juga dimotivasi untuk menumbuhkan kepedulian untuk penerapan dan pelaporan informasi akuntansi keuangan. Setelah memahami, mitra diminta untuk menerapkan dan membuat laporan keuangan sesuai dengan acuan SAP. Kemampuan tersebut diperlukan agar mitra memahami dan menguasai teknis pencatatan transaksi keuangan, dan penyusunan serta penyajian laporan keuangan. Hal ini menguatkan bahwa pengelolaan dan penyajian informasi akuntansi merupakan salah satu syarat mendukung daya saing dan memperlancar aktivitas manajemen usaha (Martini, dkk., 2018).

Untuk mendapatkan solusi, mitra disamping diberikan pengetahuan teori (ceramah dan pelatihan) yang didasarkan dari berbagai sumber acuan, juga diberikan pengetahuan praktik berupa ketrampilan

dalam menjaga kualitas informasi laporan keuangan, dari aspek sistem pengendalian intern, kompetensi sumber daya manusia dan penerapan SAP. Selanjutnya, dilaksanakan kegiatan pendampingan bagi mitra.

Khalayak dan sasaran kegiatan pengabdian ini adalah Sekretariat Daerah Kota Palembang terdiri dari 12 Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. OPD Kota Palembang

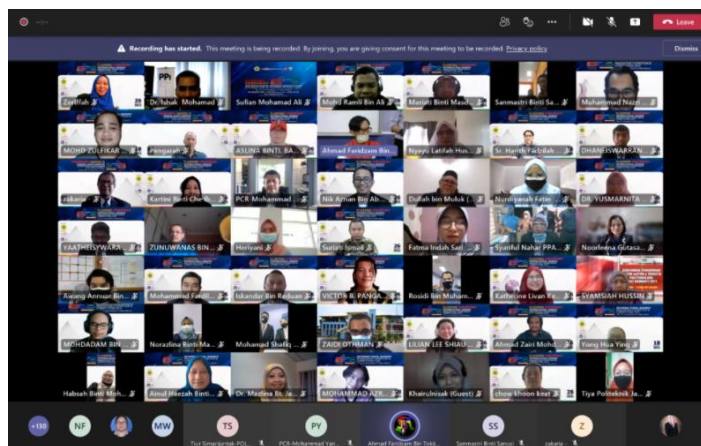
No	Nama OPD
1	Pemerintah
2	Kesejahteraan Rakyat
3	Hukum
4	Kerjasama
5	Perekonomian
6	Administrasi Pembangunan
7	Pengadaan Barang dan Jasa
8	Sumber Daya Alam

No	Nama OPD
9	Umum
10	Organisasi
11	Protokol dan Komunikasi Pimpinan
12	Perencanaan dan Keuangan

Sumber: Data yang diolah, 2021.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian ini berupa sosialisasi kepada mitra mengenai hasil penelitian yang telah dilakukan, berkaitan dengan determinasi kualitas laporan keuangan pada Setda Kota Palembang. Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan tersebut, dikaji dari aspek penerapan SAP, SPI, dan kompetensi SDM. Sosialisasi dihadiri oleh perwakilan beberapa OPD Kota Palembang, disajikan pada Gambar 1.



Gambar 1. Sosialisasi Kegiatan Pengabdian

Sekretariat Daerah Kota Palembang telah berpedoman pada Peraturan Pemerintah No. 64 Tahun 2013 tentang SAP berbasis akrual, Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Walikota Kota Palembang No. 22 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota dalam menyusun laporan keuangan yang berkualitas dan telah menerapkan kebijakan untuk selalu berpedoman terhadap peraturan tentang SAP agar laporan keuangan yang disusun

berkualitas. Dalam pengelolaan keuangan di Sekretariat Daerah Kota Palembang telah menggunakan SAP sebagai prinsip akuntansi yang diterapkan untuk menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah, yang mempunyai kerangka konseptual dan dilaksanakan dengan jangka waktu serta mempunyai tujuan tertentu yaitu untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan, memudahkan fungsi perencanaan, menyediakan informasi yang terbuka, jujur dan menyeluruh.

SPI berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada Setda Kota Palembang. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP, menyatakan SPIP adalah SPI yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Tujuannya untuk memberikan keyakinan yang memadai untuk tercapainya efektivitas dan efisiensi dengan memiliki beberapa unsur untuk pencapaian tujuan penyelenggaraan negara. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan negara dapat dilakukan melalui unsur-unsur SPI dengan melakukan langkah-langkah seperti penguatan pengawasan, pemisahan tupoksi yang jelas, pendelegasian wewenang, dokumentasi atas transaksi yang lengkap dan sah, pencatatan yang akurat dan tepat waktu serta melakukan pengujian SPI yang sudah ada. Untuk mencapai kualitas laporan keuangan yang baik, unsur-unsur tersebut harus berjalan baik. SPI (Martini, dkk., 2019) merupakan fondasi *good governance* dan garis pertama pertahanan dalam melawan ketidakbasahan dan dan informasi dalam penyusunan laporan keuangan.

Standar SDM yang diterapkan Sekretariat Daerah Kota Palembang mengharuskan pegawai tersebut memiliki keahlian dalam menyajikan laporan keuangan yang berkualitas dan telah menerapkan kebijakan pelatihan kerja berbasis kompetensi yang inklusif sehingga pegawai memiliki keahlian yang sama dalam menyusun laporan keuangan yang berkualitas. Hal ini dapat disimpulkan bahwa kompetensi SDM berperan untuk meningkatkan kualitas informasi laporan keuangan. Dalam pengelolaan keuangan di Sekretariat Daerah Kota Palembang sudah memiliki SDM yang baik, yang berkualitas, yang didukung dengan latar belakang pendidikan akuntansi, sering mengikuti pendidikan dan pelatihan, dan mempunyai pengalaman di bidang

keuangan, sehingga mampu memahami logika akuntansi dengan baik.

Sekretariat Daerah Kota Palembang telah berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPI dan telah menerapkan kebijakan memisahkan tanggung jawab dan wewenang secara tegas guna SPI berjalan dengan baik. Kompetensi SDM yang mengharuskan pegawai tersebut memiliki keahlian dalam menyajikan laporan keuangan yang berkualitas dan telah menerapkan kebijakan pelatihan kerja berbasis kompetensi yang inklusif sehingga pegawai memiliki keahlian yang sama dalam menyusun laporan keuangan. Sekretariat Daerah Kota Palembang telah berpedoman pada Peraturan Pemerintah No. 64 Tahun 2013 tentang SAP berbasis aktual, Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Walikota Kota Palembang No. 22 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota dalam menyusun laporan keuangan yang berkualitas dan telah menerapkan kebijakan untuk selalu berpedoman terhadap peraturan tentang SAP.

5. KESIMPULAN

Pemerintah daerah kota Palembang diharapkan dapat meningkatkan dan menjaga konsistensinya dalam penerapan SAP yang sudah berjalan dengan baik, penerapan SPI dengan pengawasan sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Perlu juga terus meningkatkan kualitas SDM dengan memberikan pelatihan atau praktik kerja yang menambah pengetahuan, keterampilan, dan perilaku terhadap pegawai lama maupun pegawai baru.

Kegiatan pengabdian yang telah dilaksanakan menunjukkan: 1) Mitra termotivasi untuk mengoptimalkan penerapan SAP, penerapan SPI, dan 2) Mitra mendapatkan pemahaman tentang

determinasi kualitas laporan keuangan pemerintah. Kegiatan dimulai dari penjelasan mengenai pemahaman akan pentingnya upaya menjaga kualitas informasi keuangan pemerintah, sampai optimalisasi penerapan SAP, penerapan SPI, serta pentingnya kompetensi SDM.

Untuk mendapatkan hasil yang lebih optimal, maka kajian dan sosialisasi hasil kajian akan upaya menjaga kualitas informasi keuangan pemerintah sebaiknya dilaksanakan secara berkesinambungan dan rutin. Kegiatan serupa juga sebaiknya melibatkan lebih banyak pihak-pihak yang terkait dengan pengelolaan akuntansi keuangan, agar lebih merata dan mendapatkan hasil yang lebih menyeluruh.

6. UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada pimpinan Politeknik Negeri Sriwijaya atas peluang pendanaan kegiatan pengabdian ini. Juga kepada semua pihak yang telah membantu dan berpartisipasi mulai dari persiapan proposal, pelaksanaan, penyelesaian pelaporan kegiatan, hingga tersusunnya artikel pengabdian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Harlinda. (2016). Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Riau). Volume 11 , 127-144.
- Indra. (2017). Determinasi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Ekonomi dan Manajemen* 13(1), 1907-3011.
- Mahaputra, I. P., & Wayan, P. I. (2014). *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah*, 8.2, 230-244.
- Martini, R., Lianto, N., Hartati, S., Zulkifli, Z., & Widyastuti, E. (2019). Sistem Pengendalian Intern Pemerintah atas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa di Kecamatan Sembawa. *Jurnal Akademi Akuntansi*, 2(1), 108. Retrieved from <http://ejournal.umm.ac.id/index.php/jaa>.
- Martini, R., Agustin, R., & Sari, K. R. (2020). Accrual Discretion Policy on Excess/Less Budget Financing at the Provincial Level. *TEST Engineering & Management*, 82, 9925-9935.
- Martini, R., Zulkifli, Sukmini, H. & Armaini, R. (2018). Pembukuan dan Pelaporan Informasi Akuntansi Keuangan Berbasis PSAK 45: pada Panti Asuhan Al-Amanah, Palembang. *Aptekmas*, vol. 1, no. 2, pp. 10-18.
- Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Manajerial Pegawai Negeri Sipil.
- Peraturan Menteri Dalam Negri Nomor 64 Tahun 2013 (2013). Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 217/PMK.05/2015 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 90/PMK.05/2019 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual

- Nomor 14 tentang Akuntansi Aset Tak Berwujud.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.
- Peraturan Walikota Kota Palembang Nomor 22 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota.
- Qomah, S., & Ismunwan. (2021). Faktor-faktor yang Mempengaruhi kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi Trisakti*. Vol. 8, 95-108.